

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah sumber daya manusia menjadi salah satu permasalahan paling penting bagi negara berkembang seperti Indonesia. Masalah sumber daya manusia tersebut tidak bisa terlepas dari bidang pendidikan, yang secara umum diidentikkan dengan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Seperti yang diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk memperlancar tujuan tersebut maka dibutuhkan sebuah lembaga pendidikan yang disebut sekolah. Dalam pendidikan formal (sekolah) ada beberapa jenjang pendidikan, mulai dari yang paling dasar sampai dengan yang paling tinggi. Salah satu jenjang pendidikan di Indonesia adalah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Terkait dengan dunia pendidikan, tujuan dari dunia pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang berkualitas yaitu seperti memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki kemampuan belajar yang cukup baik pula. Sehingga, untuk melihat seseorang tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan belajar yang cukup baik dapat dilihat dari prestasi belajarnya. Kebanyakan orang berasumsi bahwa prestasi akademik yang rendah berarti seseorang tersebut tidak mampu

menerima materi pelajaran dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Berbeda dengan yang memiliki prestasi akademik yang baik, akan dianggap memiliki pengetahuan yang baik pula dan di anggap mampu belajar. Dalam mendapatkan prestasi yang memuaskan berbagai cara dapat ditempuh oleh seorang siswa, salah satu cara yang positif yaitu dengan cara belajar yang giat, disisi lain ada cara yang negatif yaitu dengan cara berbuat curang seperti mencontek.

Dari beberapa hasil survei menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia belum menggembirakan. Berdasarkan survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 2001 yang berpusat di Hongkong, diketahui bahwa sistem pendidikan di Indonesia adalah yang terburuk di kawasan Asia, yaitu dari 12 negara yang di survei, Indonesia menduduki urutan ke 12. Demikian jugaberdasarkan data dari *Human Development Indeks* (HDI) tahun 2008, Indonesia menempati posisi 112, turun dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi 107 dari 112 Negara. Hal ini mengakibatkan perlu adanya suatu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di setiap jenjang pendidikan.<sup>1</sup>

Menurut data *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) yang dipublikasikan oleh *Education for All Global Monitoring Report 2011, Education Development Index (EDI)*, Indonesia berada pada posisi ke-69 atau empat strip di bawah Malaysia yang berada di posisi ke-65 dari 127 negara di dunia, jauh tertinggal dari Brunei yang berada di posisi ke-

---

<sup>1</sup> Azizah Fitri, ISO Bukan Sekedar Isonisasi (<http://aziza-fitri-anakganto.blogspot.com/2014/05/iso-bukan-sekedar-isonisasi.html>) diakses pada tanggal 08 April 2015 pukul 13.45 WIB

34.<sup>2</sup>

Pada tiap tahunnya kualitas pendidikan di Indonesia bisa dibilang standar atau jauh dari negara-negara maju lainnya, untuk itu berbagai terobosan dan kebijakan penting telah diambil oleh Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu sejalan dengan komitmen yang digariskan oleh UNESCO melalui program Education for All (EFA).<sup>3</sup>

Dalam rangka penjaminan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005.<sup>4</sup> Data rata-rata akreditasi sekolah menengah atas secara nasional yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagaimana tabel berikut :

---

<sup>2</sup> Rani Hardjanti, *Soal pendidikan, Indonesia kalah dengan Malaysia* (<http://news.okezone.com/read/2012/10/23/373/708026/soal-pendidikan-indonesia-kalah-dengan-malaysia>) diakses pada tanggal 08 April 2015 pukul 14.04 WIB

<sup>3</sup> Lukman Coroners, *Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan* (<http://lukmancoroners.blogspot.com/2010/05/upaya-peningkatan-mutu-pendidikan.html>) diakses pada tanggal 08 April 2015 pukul 15.47 WIB

<sup>4</sup> Fatah Arafat, *Makalah Penjaminan Mutu Pendidikan* ([http://www.academia.edu/9548241/MAKALAH\\_PENJAMINAN\\_MUTU\\_PENDIDIKAN](http://www.academia.edu/9548241/MAKALAH_PENJAMINAN_MUTU_PENDIDIKAN)) diakses pada tanggal 09 April 2015 pukul 16.35 WIB

**Tabel I.1**  
**Rata-Rata Akreditasi Sekolah Menengah Atas**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Rata-rata Akreditasi</b>
<b>1</b>	<b>2010</b>	81,43
<b>2</b>	<b>2011</b>	78,03
<b>3</b>	<b>2012</b>	79,58
<b>4</b>	<b>2013</b>	72,47
<b>5</b>	<b>2014</b>	73,87
<b>6</b>	<b>2015</b>	87,07

*Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah*

Berdasarkan Tabel I.1 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata akreditasi sekolah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 rata-rata akreditasi sekolah mengalami penurunan sebesar 3,40 poin dari rata-rata akreditasi tahun 2010. Walaupun rata-rata akreditasi pada tahun 2012 sempat naik 1,55 poin dari tahun 2011, tetapi pada tahun 2013 dan 2014 kembali mengalami penurunan yang cukup besar. Pada tahun 2010 rata-rata akreditasi masih berkisar di 81,43 tetapi pada tahun 2014 turun menjadi 73,87. Namun pada hasil akreditasi tahun 2015 sudah mengalami perbaikan yaitu dengan rata-rata 87,07.

Menurunnya rata-rata akreditasi Sekolah Menengah Atas dari tahun 2011 sampai tahun 2014 di atas, terjadi karena banyak hal, diantaranya salah satunya sekolah-sekolah yang tidak memperpanjang status akreditasinya dan ada pula Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang tidak melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk menilai kelayakan sekolah-sekolah tersebut.

Untuk melihat sudah baik atau belumnya akreditasi suatu sekolah, dapat dilihat dari kriteria pemeringkatan hasil akreditasi. Kriteria pemeringkatan hasil

Akreditasi Sekolah/Madrasah memperoleh peringkat akreditasi A (amat baik), jika memperoleh Nilai Akhir (NA) lebih besar dari 85 sampai dengan 100, peringkat akreditasi B (baik), jika memperoleh NA lebih besar dari 70 sampai dengan 85, peringkat akreditasi C (cukup baik), jika memperoleh NA lebih besar dari atau sama dengan 56 sampai dengan 70. Dengan demikian berdasarkan data rata-rata akreditasi pada Tabel I.1 di atas, walaupun nilainya menurun, tetapi nilainya masih pada kisaran 70 sampai 85, dengan kriteria baik atau dengan ketentuan kriteria status terakreditasi terpenuhi.

Sebagai dampak dari lalainya sekolah-sekolah tidak memperpanjang status akreditasinya ataupun Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Medrasah tidak melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah menyebabkan sekolah-sekolah dimaksud tidak terakreditasi. Tidak terakreditasinya sekolah dimaksud berakibat cukup fatal, seperti pada tahun 2014 sebanyak 611 sekolah di Riau tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan Ujian Nasional (UN), karena sekolah-sekolah tersebut belum memiliki akreditasi. Akibatnya para siswa terpaksa menjalani UN dengan menumpang ke sekolah lain. Sekolah-sekolah yang belum memiliki akreditasi tersebut tidak hanya terdapat di kabupaten saja, tapi di ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru juga cukup banyak belum terakreditasi. Di Pekanbaru terdapat 611 sekolah yang belum memiliki akreditasi itu, untuk tingkat SD sebanyak 208 sekolah, SLTP/MTs sebanyak 216 sekolah, dan SLTA sebanyak 79 sekolah, SMK sebanyak 85 sekolah dan SLB 23 sekolah. Jumlah sekolah yang paling banyak belum terakreditasi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebanyak 122 sekolah dari 1.071 sekolah yang ada. Sedangkan daerah yang paling

sedikit sekolahnya belum terakreditasi adalah Kabupaten Pelalawan yaitu sebanyak 13 sekolah.<sup>5</sup>

Ukuran penyelenggaraan pendidikan kualitas tidak terlepas dari delapan standar nasional pendidikan oleh BSNP yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah No.19/2005. Terdapat delapan SNP antara lain: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian<sup>6</sup>. Akreditasi suatu sekolah akan dapat diukur setelah semua standar penilaian untuk akreditasi sekolah terpenuhi.

Mendasarkan pada uraian di atas, berdasarkan data Badan Akreditasi Provinsi tingkat Sekolah Menengah(BAP-S/M) untuk Provinsi DKI Jakarta, juga menunjukkan belum semua Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta di Provinsi DKI Jakarta terakreditasi. Gambaran hasil akreditasi SMA Swasta tahun 2014 sebagaimana tabel berikut ini :

---

<sup>5</sup> Rgi/Ad, Belum miliki akreditasi, 611 sekolah tak bisa laksanakan UN(<http://www.riau.go.id/home/content/2014/03/12/1344-belum-miliki-akreditasi-611-sekolah-tak-bisalaksanakan>) di akses pada tanggal 12 April 2015 pukul 22.13 WIB

<sup>6</sup> [http://bsnp-indonesia.org/id/?page\\_id=61](http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=61) diakses pada tanggal 10 April 2015 pukul 13.16 WIB

**Tabel I.2**  
**Hasil Akreditasi Sekolah Menengah Atas Swasta**  
**di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015**

Wilayah	Jumlah Sekolah	Terakreditasi Tahun 2015				
		A	B	C	TT	Jumlah
Jakarta Timur	76	25	16	1	-	42
Jakarta Barat	88	31	15	-	-	46
Jakarta Selatan	62	26	8	-	-	34
Jakarta Utara	57	16	8	-	-	24
Jakarta Pusat	46	5	5	-	-	10
Jumlah	329	103	52	1	-	156

*Sumber: BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta*

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 dari 329 SMA swasta yang sudah terakreditasi tahun 2015 sebanyak 156 sekolah atau 47,41%. Jumlah yang sudah terakreditasi tahun 2015 tersebut sebanyak 103 sekolah yang mendapat peringkat A, 55 sekolah mendapat peringkat B, dan 1 sekolah mendapat peringkat C.

Wilayah Jakarta Timur, berdasarkan Tabel I.2 di atas, diketahui bahwa pada tahun 2015 terdapat 76 SMA Swasta, dimana sebanyak 42 sekolah yang terakreditasi tahun 2015 atau 55,26%. Jumlah yang sudah terakreditasi tahun 2015 tersebut sebanyak 25 sekolah yang mendapat peringkat A, 16 sekolah mendapat peringkat B, dan 1 sekolah mendapat peringkat C.

Berdasarkan data BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat juga sebaran peringkat akreditasi SMA Swasta. Berikut ini gambaran hasil nilai akreditasi peringkat paling rendah sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel I.3**  
**Hasil Akreditasi Sekolah Menengah Atas Swasta**  
**dengan nilai paling rendah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015**

No urut	Nama Sekolah	Kabupaten	Peringkat	Nilai
146	SMAS Nurul Huda Jakarta	Jakarta Timur	B	73
147	SMAS Plus Khadijah	Jakarta Selatan	B	73
148	SMAS Dian Persada Jakarta	Jakarta Timur	B	72
149	SMAS Lentera Indonesia	Jakarta Selatan	B	72
150	SMAS Pembangunan 3 Jatinegara	Jakarta Timur	B	72
151	SMAS Perguruan Nasional Jakarta	Jakarta Pusat	B	72
152	SMAS PGRI 1 Jakarta	Jakarta Timur	B	72
153	SMAS Pratama	Jakarta Timur	B	72
154	SMAS Triwibawa Jakarta	Jakarta Pusat	B	72
155	SMAS Permata Indah Jakarta	Jakarta Utara	B	71
156	SMAS PGRI 10 Jakarta	Jakarta Timur	B	71
157	SMAS Katolik Nusa Melati	Jakarta Timur	C	70

Keterangan :

A : Amat Baik dengan skor antara 80 - 100

B : Baik dengan skor antara 70 - 80

C : Cukup dengan skor antara 60 - 70

TT : Tidak Tuntas belum memenuhi standar akreditasi

Sumber: BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Tabel I.3 di atas diketahui bahwa pada tahun 2015, dari 12 SMA Swasta di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai akreditasi terendah, 7 sekolah diantaranya berlokasi di Kota Jakarta Timur. Rincian nilai akreditasi SMA Swasta di Jakarta Timur dimaksud adalah SMAS Nurul Huda, SMAS Dian Persada, SMAS Pembangunan 3, SMAS PGRI I, SMAS Pratama, dan SMAS PGRI 10 mendapat akreditasi B dengan nilai masing-masing 73, 72, 72, 72, dan 71, serta SMAS Katolik Nusa Melati dengan nilai 70 mendapat akreditasi C. Walaupun dari ke-12 SMAS swasta di atas mendapatkan akreditasi B tetapi nilai yang diperoleh masih sangat rendah yaitu pada nilai minimal pada kategori B dengan range 70 sampai dengan 80.



Penilaian akreditasi merupakan salah satu upaya pola pembinaan dan pengembangan sekolah swasta yang meliputi segi-segi administrasi sekolah, kelembagaan, kurikulum, ketenagaan, siswa, sarana prasarana dan situasi umum pada sekolah yang bersangkutan. Khusus mengenai masalah akreditasi, dewasa ini pemerintah telah memberikan perhatian yang sangat serius. Realitanya di lapangan pelaksanaan akreditasi saat ini masih sangat belum layak karena masih belum memenuhi kriteria-kriteria yang tertera dalam prosedur akreditasi dan masih terfokus pada jalur pendidikan formal, itupun pelaksanaannya masih mengalami banyak hambatan dengan banyaknya ketidaksesuaian data yang diperoleh dengan kenyataan di lapangan.

Meskipun demikian akreditasi masih dapat digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan suatu sekolah. Hal ini diperkuat oleh Bab II pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa akreditasi sebagai salah satu tolok ukur kualitas pendidikan, yaitu : “Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.”<sup>7</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akreditasi merupakan salah satu standar nasional yang dapat diterapkan dalam penjaminan dan pengendalian kualitas pendidikan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi tercapainya kualitas pendidikan adalah lingkungan kerja, manajerial kepala sekolah, motivasi kerja guru, supervisi kepala sekolah, dan pemberdayaan guru. Lingkungan kerja

---

<sup>7</sup> Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional" (2003).

merupakan salah satu faktor yang dianggap mampu meningkatkan kualitas pendidikan karena sebagai manusia yang keberadaannya tidak dapat terlepas dari lingkungan sekitar, maka guru dalam melaksanakan tugas sangat terkait dengan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang jauh dari hiruk pikuk kesibukan masyarakat dalam berusaha maupun dalam bekerja akan mampu menunjang terselenggaranya proses kerja yang tenang dan tertib. Sedangkan berdasarkan hasil pengamatan lingkungan kerja di sekolah, masih banyak sekolah yang berdekatan dengan keramaian lalu lintas seperti dekat dengan perlintasan kereta api dan jalan raya yang mengurangi konsentrasi guru dan siswa dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, serta fasilitas kerja yang kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas guru terutama sarana dan prasarana seperti buku-buku di perpustakaan yang tidak lengkap, ruang kerja guru yang kurang memadai dan lain sebagainya. Hal tersebut apabila dibiarkan maka akan sangat berdampak pada kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut sehingga menurunkan kualitas dari sekolah itu sendiri.

Selanjutnya manajerial kepala sekolah juga dianggap mampu mempengaruhi kualitas pendidikan. Kepala sekolah sebagai manajer harus mempunyai suatu kemampuan dalam mengarahkan dan memimpin suatu organisasi, kepala sekolah juga harus dapat menguasai bagaimana cara mengelola suatu organisasi. Pengaruh langsung manajerial dapat terlihat dari efektifitas kerja kepala sekolah. Namun Kompas.com memberitakan bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah hanya mendapatkan nilai 74, dimana berada dibawah batas minimal kelulusan yaitu 76. Nilai ini menggambarkan bahwa kemampuan manajerial kepala sekolah masih

buruk.<sup>8</sup> Surya Dharma selaku Direktur Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) mengatakan bahwa lemahnya manajerial kepala sekolah terjadi karena pola rekrutmen kepala sekolah yang belum optimal.<sup>9</sup> Oleh karena itu masih diperlukan standarisasi seperti dari proses pemilihan seperti harus guru bergelar S1 dantelah melalui masa pelatihanserta karantina. Jika kemampuan manajerial kepala sekolah sudah terlatih maka didalam prakteknya akan memudahkan kepala sekolah untuk memimpin sekolah menjadi lebih baik.

Faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan selanjutnya adalah motivasi kerja. Motivasi kerja adalah daya dorong dari dalam diri seseorang untuk bekerja dalam motivasi terdapat berbagai keinginan dan usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Guru dalam kegiatan belajar mengajar masih sering dijumpai yang memiliki motivasi mengajar rendah. Kenyataannya masih dijumpai guru yang memberikan tugas atau memberikan catatan tanpa penjelasan yang berguna bagi siswa dan meninggalkan kelas. Hal ini dapat menyebabkan kualitas pendidikan semakin menurun dengan tidak berjalannya kegiatan belajar-mengajar yang baik karena guru tersebut tidak masuk untuk mengajar di kelas.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan adalah supervisi kepala sekolah. Supervisi kepala sekolah adalah layanan yang diberikan kepada guru untuk tujuan memperbaiki pengajaran dengan siswa sebagai penerima manfaat tertinggi.

---

<sup>8</sup> Kompas.com, <http://edukasi.kompas.com/read/2012/07/24/05154075/kompetensi.Kepala.Sekolah>

<sup>9</sup> Surya Darma, <http://nasional.kompas.com/read/2008/08/11/1654270/Kepala.Sekolah.di.Indonesia.Tidak>

Meskipun dapat dilihat pentingnya peran kepala sekolah salah satunya sebagai *supervisor*, namun supervisi kepala sekolah masih perlu diperhatikan. Kompas.com mengatakan bahwa kompetensi kepala sekolah masih rendah dimana berdasarkan pemetaan kompetensi kepala sekolah di 31 provinsi, ternyata supervisi kepala sekolah umumnya rendah. Dalam penelitian kompetensi kepala sekolah ditetapkan batas minimal kelulusan adalah 76. Kenyataannya, kompetensi supervisi masih berada dibawah nilai minimal yaitu 72.<sup>10</sup>

Nilai supervisi kepala sekolah yang dibawah nilai minimal seperti yang telah dijelaskan tersebut dapat dilihat dari kurangnya pengawasan dari kepala sekolah pada perkembangan diri guru, contohnya seperti pelatihan atau *workshop* yang sangat terbatas untuk guru. Selama ini lebih banyak program-program yang terlalu fokus pada murid, seperti pelatihan ataupun pembinaan, sehingga tanpa disadari bahwa guru juga membutuhkan pengembangan diri yang baik agar mereka dapat berkontribusi lebih dalam memajukan murid dan sekolah. Selain itu juga kurikulum harus selalu berkembang. Jelas terlihat bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum berbeda dimana satu sekolah menggunakan kurikulum terbaru sedangkan sekolah lain lebih nyaman dengan kurikulum sebelumnya. Lalu kepala sekolah juga berperan dalam memperbaiki pengajaran disekolah, salah satunya dengan membantu manajemen kelas. Namun masih jarang terlihat kepala sekolah yang meluangkan waktu untuk sesekali berkunjung ke kelas untuk melihat dan merasakan secara langsung kegiatan belajar. Oleh sebab itu semakin jelas bahwa memang diperlukan peningkatan

---

<sup>10</sup> <http://edukasi.kompas.com/read/2012/07/24/05154075/Kompetensi.Kepala.Sekolah.Masih.Rendah>

kualitas sekolah melalui peran kepala sekolah yang andal dan kuat, dimana salah satunya dapat berbentuk supervisi.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan adalah pemberdayaan guru. Pemberdayaan guru ini adalah pemberian tanggung jawab dan wewenang kepada guru untuk mengambil keputusan serta menciptakan kondisi saling percaya antar manajemen dan guru. Pemberdayaan guru juga menekankan pada peran penting guru dalam membuat keputusan profesional mereka tentang pengajaran dan pembelajaran.<sup>11</sup>

Profesi guru berada dalam barisan terdepan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka upaya pemberdayaan guru sebagaimana seharusnya sebuah profesi, diyakini akan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pendidikan. Meskipun demikian pemberdayaan guru belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari kredibilitas guru dan kompetensi guru di Indonesia masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Kompas.com menyatakan bahwa dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini, dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51 persen yang berpendidikan S-1 atau lebih, sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1. Selain itu salah satu cara untuk memberdayakan guru melalui sertifikasi guru sebagai pembuktian peningkatan kualitas intelektual profesi pendidik juga belum bisa dibuktikan. Umumnya guru hanya sekadar mengejar sertifikat demi meningkatkan penghasilannya dan tidak fokus pada tugas utama yaitu meningkatkan kecerdasan siswa serta membimbing dengan tepat yang diharapkan

---

<sup>11</sup> Zembylas, Michalinos, and Elena C. Papanastasiou. *Modeling teacher empowerment: The role of job satisfaction*. Educational Research and Evaluation 11.5 (2005), hal. 433-459.

juga dapat memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah tersebut.<sup>12</sup> Oleh karena itu, upaya peningkatan pada pemberdayaan guruyang tepat dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, dimana dari hasil survei dan data akreditasi sekolah SMA Swasta di Provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya kualitas pendidikan di DKI Jakarta masih belum menggembirakan, maka peran Kepala Sekolah dan peran Guru menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di lingkungan sekolah tentu dapat berpengaruh pada kualitas pendidikan, salah satunya kompetensi kepala sekolah dalam supervisi. Selanjutnya, untuk meningkatkan peran guru dalam peningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan meningkatkan profesional guru yaitu salah satunya dengan pemberdayaan guru. Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Pemberdayaan Guru terhadap Kualitas Pendidikan pada 19 SMA Swasta.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan bahwa permasalahan kualitas pendidikan di pengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kualitas pendidikan pada 19 SMA Swasta?
2. Apakah terdapat pengaruh antara manajerial kepala sekolah terhadap kualitas pendidikan pada 19 SMA Swasta?

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 449

3. Apakah terdapat pengaruh antara motivasi kerja guruterhadap kualitas pendidikan pada 19 SMA Swasta?
4. Apakah terdapat pengaruh antara supervisi kepala sekolah terhadap kualitas pendidikanpada 19 SMA Swasta?
5. Apakah terdapat pengaruh antara pemberdayaan guru terhadap kualitas pendidikan pada 19 SMA Swasta?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas karena keterbatasan peneliti dalam hal dana, kemampuan, dan waktu, maka penelitian ini dibatasi hanya pada “Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Pemberdayaan Guru terhadap Kualitas Pendidikan pada 19 SMA Swasta.”

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh antara supervisi kepala sekolah terhadap kualitas pendidikan pada 19 SMA Swasta?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pemberdayaan guru terhadap kualitas pendidikan pada 19 SMA Swasta?
3. Apakah terdapat pengaruh antara supervisi kepala sekolah dan pemberdayaan guru terhadap kualitas pendidikan pada 19 SMA Swasta?

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan serta masukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Jakarta Timur dipengaruhi oleh supervisi kepala sekolah dan pemberdayaanguru.

### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya dan pemecahan masalah mengenai kualitas pendidikan di Kota Jakarta Timur yang selanjutnya dapat dikembangkan oleh berbagai pihak. Penelitian ini juga sebagai bahan masukan dan sumbang saran bagi pembuat dan pengambil kebijakan yang berkaitan dengan kualitas.